

## DAFTAR PUSTAKA

- Arto, M. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dellyana, S. (2004). *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Effendi, T. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaruannya Di Indonesia)*. Malang: Setara Press.
- Gallanger Anne, S. L. (2006). *Economic, Social, and Cultural Right: A Legal Resource Guide*.
- Good, C. V. (1977.). *Dasar Konsep Pendidikan Moral*. Bandung: Alfabeta.
- Gosita, A. (1930). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hans Kelsen, J. N. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Normatif*. Jakarta.
- Kertonegoro. (n.d.). *Kuliah Hukum Pidana*. Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa.
- Lamintang, T. (2012). *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mamudji, S. S.-S. (2004). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama.
- Masriani, Y. T. (2004). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pengadilan Tinggi Semarang. ( 2022, July 17). *pt-semarang.go.id*. Retrieved from [pt-semarang.go.id: https://pt-semarang.go.id](https://pt-semarang.go.id)
- Poerwadarminta. (1985). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahardjo, S. (2003). *Sisi-Sisi Lain Hukum Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Ranoemihardja, A. (1984). *Hukum Pidana: Azas-Azas Pokok Pengertian dan Teori Serta Pendapat Beberapa Sarjana*. Bandung: Tarsito.
- Santoso, T. (2001). *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Saraswati, R. (2015). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Sinaga, D. (2015). *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila*. Jakarta: Nusamedia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945#:~:text=Undang%2Dundang%20Dasar%20Negara%20Republik%20Indonesia%20Tahun%201945&text=Bahwa%20sesungguhnya%20Kemerdekaan%20itu%20ialah,sesuai%20dengan%20perikemanusiaan%20dan%20perikeadilan>

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38701/uu-no-31-tahun-2014>

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/4858/uu-no-44-tahun-2008>

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999>

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Konvensi Tentang Hak-Hak Anak

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/63923/keppres-no-36-tahun-1990>

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<https://www.bphn.go.id/data/documents/12uu011.pdf>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47041/uu-no-8-tahun-1981>